

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) merupakan tujuan penting dalam program pembangunan suatu negara. Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan berbagai implementasi kebijakan pemerintah untuk mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Menurut Todaro (2009), keberhasilan pembangunan ekonomi memiliki 3 aspek nilai pokok :

- 1) Berekembangnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*)
- 2) Meningkatnya rasa harga diri (*self esteem*)
- 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) sebagai salah satu dari hak asasi manusia

Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan riil perkapita masyarakat dalam jangka panjang disertai dengan perbaikan kelembagaan. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan pendapatan perkapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya suatu proses perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB/PNB) (Arsyad, 1999).

Pendapatan Nasional merupakan salah satu ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu negara, sebagai gambaran tentang perkembangan perubahan perekonomiannya (Dumairy,1996). Dinamika perkembangan pendapatan nasional suatu negara dari suatu periode ke periode berikutnya mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Nasional Perkapita menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam aspek penilaian ekonominya, yang diukur dengan peningkatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) (Tambunan, 2012).

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai peningkatan pendapatan perkapita penduduk secara berkesinambungan dalam periode yang panjang. Menurut (Prayitno & Santosa, 1996) pertumbuhan ekonomi memiliki Tiga unsur penting yaitu *Pertama*, terjadi secara terus menerus didalam pertumbuhannya. *Kedua*, mendorong terjadinya kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. *Ketiga*, usaha penaikan pendapatan tersebut dilakukan secara terus menerus.

Dalam penjelasan lain pertumbuhan ekonomi yaitu apabila dikatakan output lebih banyak didalam kesatuan input dan juga perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak (Irawan & Suparmoko, 1992). Menurut Mankiw, Quah & Wilson (2008) fungsi PDB yaitu nilai pendapatan total dalam kegiatan ekonomi dan jumlah pengeluaran barang dan jasa hasil dari produksi perekonomian. Sedangkan tingkat

PDB riil merupakan ukuran kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan PDB riil menunjukkan kemajuan perekonomian. Dalam arti lain pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai kenaikan tingkat pendapatan perkapita masyarakat pada suatu tahun tertentu dan perekonomian dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang mengalami kecenderungan peningkatan (Sukirno, 1985).

Fokus utama meningkatkan produktifitas pendapatan perkapita masyarakat sangatlah penting dalam jangka panjang. Sebagai gambaran yang menjelaskan perkembangan adanya perubahan kesejahteraan masyarakat. Selain dari produktifitas pendapatan perkapita yang dijadikan salah satu indikator untuk menjelaskan kesejahteraan masyarakat, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu distribusi pendapatan yang merata. Maka dari itu peran pemerintah sangat penting sebagai mobilisator pembangunan ekonomi. supaya Pertumbuhan ekonomi tidak terpusat pada wilayah tertentu tetapi pada setiap masing-masing daerah. Seperti yang terjadi pada dinamika perkembangan pembangunan ekonomi indonesia ketika masa orde baru yang mengalami kesenjangan ekonomi antar daerah dan pembangunan hanya terpusat dipulau jawa. Sebagai evaluasi dari krisis ekonomi 1998 maka arah pembangunan indonesia mengalami perubahan dari sistem sentralistik pembangunan menuju otonomi daerah.

Prinsip otonomi daerah merupakan bagian dari program pembangunan nasional dimana setiap daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengelola sendiri potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Otonomi daerah merupakan upaya pemerintah pusat sebagai koordinator dan pemerintah daerah

sebagai mobilisator pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah harus membuka peluang dan memberikan kebebasan kepada pelaku dalam rambu yang telah disepakati, pada prinsipnya tidak boleh ada batasan dalam mobilitas faktor produksi (Basri, 2002).

Pembangunan daerah merupakan bagian dari integral pembangunan nasional dimana setiap daerah diarahkan untuk mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah dengan menyesuaikan prioritas dan potensi daerah sehingga tujuan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup bisa dicapai, yang berimplikasi kemandirian daerah dan kemajuan yang merata (Kartasmita,1996). Dengan demikian pada setiap daerah harus mampu menjawab tantangan dan problematika pembangunan, agar bisa bersaing dengan perekonomian global.

Tabel 1.1

Persentase Kontribusi Pendapatan Regional Bruto Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Timur di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2016

Kabupaten /Kota		Tahun			
		2013	2014	2015	2016
NO					
1.	Garut	2,67	2,65	2,65	2,66
2.	Tasikmalaya	1,69	1,66	1,67	1,68
3.	Ciamis	1,48	1,46	1,46	1,47
4.	Sumedang	1,61	1,60	1,62	1,62
5.	Kota Tasikmalaya	0,97	0,97	0,99	1,00
6.	Banjar	0,22	0,21	0,22	0,22
Total		8,64	8,55	8,61	8,65

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa kontribusi wilayah Priangan Timur terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sangatlah rendah hanya

sekitar 8%, dan kontribusi dari tahun ketahun mengalami fluktuatif. Misalnya tahun 2013 kontribusi wilayah Priangan Timur sebesar 8,64% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 8,55%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 8,61% yang lebih kecil dibandingkan tahun 2013 kemudian pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 8,65%.

Pemaparan kontribusi wilayah Priangan Timur terhadap PDRB Provinsi Jabar diatas, mencerminkan adanya kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Barat. Menurut pengamat ekonomi UNPAD Rina Indiatuti didalam Media Pikiran Rakyat (2015) pada seminar “Penguatan Kerja Sama antar daerah untuk mendorong perekonomian di wilayah Priangan Timur” dikantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, menurutnya bahwa 75% PDRB Provinsi Jabar ditopang dari 10 daerah.

Tabel 1.2

Data 10 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Kontribusi PDRB Tertinggi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2016

Kabupaten/Kota		Tahun			
No		2013	2014	2015	2016
1.	Kota Bandung	16,33	16,25	16,03	15,71
2.	Depok	3,06	3,13	3,16	3,20
3.	Kota Bekasi	4,57	4,58	4,61	4,61
4.	Karawang	11,22	11,16	10,89	10,95
5.	Kab Bandung	5,38	5,45	5,59	5,65
6.	Indramayu	5,02	4,83	4,26	3,99
7.	Purwakarta	3,22	3,25	3,27	3,28
8.	Sukabumi	3,05	3,03	3,06	3,07
9.	Bogor	10,77	10,80	10,95	11,04
10.	Kab Bekasi	16,33	16,25	16,03	15,71
Total		78,95	78,73	77,85	77,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.2 dapat menunjukkan bahwa sekitar hampir 80% PDRB Provinsi Jabar berasal dari 10 daerah tersebut. Ketidakmerataan pendapatan ekonomi di provinsi Jabar khususnya wilayah Priangan Timur dapat berimplikasi pada kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Berdasarkan realitas kesenjangan yang terjadi di wilayah Priangan Timur peneliti ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai objek penelitian.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk mengukur kesuksesan pembangunan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat yang dihitung pada kenaikan PDRB pada setiap daerah. Menurut Mankiw (2008), tingkat produktifitas pendapatan (pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berbeda tergantung dari faktor kepemilikan penentunya, diantaranya modal manusia, modal fisik, modal sumber daya alam dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh santi (2013) melakukan riset tentang pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah hasilnya menemukan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Brata (2002) juga menemukan hasil positif atas pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditelitinya. Kualitas modal manusia merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi karena terdapat hubungan saling mempengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi.

Novi dkk (2014), melakukan penelitian tentang pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana hasil yang ditelitinya

menyatakan sisi infrastruktur keras, listrik, jalan dan bongkar muat pelabuhan berdampak positif dan signifikan dalam mendorong pendapatan perkapita. Sementara itu hasil positif dan signifikan diperoleh atas penelitian pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia yang dilakukan oleh Rindang dan Muhammad (2009), dimana elastisitas listrik besar pengaruhnya sebesar 0,33 dibandingkan variabel air dan infrastruktur jalan.

Sedangkan pada penelitian Tri (2004) melakukan riset tentang pengukuran besarnya peran industri kecil dan besar dalam perekonomian di Jawa Tengah, dapat disimpulkan industri kecil dan industri besar tidak signifikan dalam mendorong pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah karena output dan nilai produksi yang dihasilkan sangat rendah.

Urgensi peneliti berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti hendak melakukan penelitian tentang sejauh mana pengaruh infrastruktur jalan, komponen indeks pembangunan manusia dan jumlah industri besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Priangan Timur dalam periode tahun 2011-2016.

B. Batasan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Priangan Timur dari tahun 2011-2016. Esensi variabel-variabel yang dianggap berpengaruh yaitu infrastruktur jalan, indeks pembangunan manusia dan jumlah industri besar. Ruang lingkup pengkajian dibatasi hanya pada dinamika fenomena yang terjadi di wilayah

Priangan Timur sesuai dengan judul penelitian, yang mengambil data dari tahun 2011-2016.

C. Rumusan Masalah

Pasca diberlakukannya otonomi daerah diharapkan dapat terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Setiap daerah diberikan demokrasi dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola potensi yang dimiliki, terkhusus wilayah Priangan Timur yang menjadi objek penelitian ini. Dimana wilayah Priangan Timur memiliki modal untuk menjadi daerah yang lebih maju dalam pembangunan ekonominya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Berdasarkan pada pemaparan diatas maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Priangan Timur?
2. Bagaimana pengaruh variabel AHH (Angka Harapan Hidup) terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Priangan Timur?
3. Bagaimana pengaruh variabel RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Priangan Timur?
4. Bagaimana pengaruh PPPI (*Purchasing Power of Parity Index*) terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Priangan Timur?
5. Bagaimana pengaruh Jumlah Industri Besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi diwilayah Priangan Timur
2. Menganalisis pengaruh angka harapan hidup (AHH) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur
3. Menganalisis pengaruh Rata-Rata lama sekolah (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur
4. Menganalisis pengaruh paritas daya beli (*Purchasing power parity index*) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur
5. Menganalisis bagaimana pengaruh jumlah indutri Besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur

E. Manfaat Penelitian

1. Bahan Evaluasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah priangan timur dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah
2. Sebagai materi referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian berikutnya yang mengambil tema yang sama
3. Dan bagi saya sendiri sebagai wadah menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengaplikasikan ilmu terutama Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah diemban.